

HIRARKI WILAYAH PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKAN INFRASTRUKTUR DASAR DI KECAMATAN ARGOMULYO SALATIGA TAHUN 2020

Novi Ghitta Khairina¹; Suryo Sakti Hadiwijoyo²

¹Program Studi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada,

²Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana.

E-mail: novighitha99@mail.ugm.ac

ABSTRAK

Angka kemiskinan Kota Salatiga tahun 2016-2019 menunjukkan trend penurunan. Tetapi, tetapi pada tahun 2020 angka kemiskinan Kota Salatiga mengalami kenaikan sebesar 0,18% dari semula 4,76% di tahun 2019 menjadi 4,94% di tahun 2020. Secara eksplisit, kemiskinan dapat dipandang dari berbagai sektor, salah satunya sektor infrastruktur dasar. Daerah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik seringkali laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraannya juga lebih baik. Sebaliknya memiliki kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan hirarkhi wilayah miskin atau pewilayahan kemiskinan berdasarkan aspek infrastruktur dasar, dengan unit kajian Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan prinsip penskalaan (teknik penskalaan/*scalling*) terhadap variabel-variabel penentu kesejahteraan sosial di bidang infrastruktur dasar yang bersumber pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Salatiga Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kelurahan Kumpulrejo merupakan wilayah yang layak menjadi prioritas pertama dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan berbasis sektor infrastruktur dasar di Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Tahun 2020. Sedangkan wilayah Kelurahan Noborejo, Tegalrejo dan Ledok menjadi prioritas kedua. Sedangkan prioritas ke tiga yaitu di Kelurahan Randuacir dan Cebongan. Hirarki pewilayahan berdasarkan sektor infrastruktur dasar tersebut dapat menjadi pijakan usulan atau rekomendasi intervensi program yang relevan.

Kata kunci: hirarki wilayah prioritas, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur dasar, Kecamatan Argomulyo

ABSTRACT

The poverty rate of Salatiga City in 2016-2019 showed a decreasing trend, however, in 2020 there was an increase of 0.18% from 4.76% in 2019 to 4.94% in 2020. Explicitly poverty can be viewed from various sectors, one of which is the basic infrastructure sector. Regions with better infrastructure systems often have good rates of economic growth and welfare, on the other hand, when compared to regions with limited infrastructure, which affects the welfare of their people. This study aims to carry out a hierarchy of poor areas or poverty zoning based on basic infrastructure aspects, with a study unit in Argomulyo District, Salatiga City. The research method used is descriptive quantitative with the principle of scaling (scaling/scaling technique) on the variables determining social welfare in the basic infrastructure sector which is sourced from the Integrated Data for Social Welfare (IDSW) of Salatiga City in 2020. The results of this study indicate that Kelurahan Kumpulrejo is the first priority area in the intervention of poverty reduction programs based on the basic infrastructure sector in Argomulyo District, Salatiga City in 2020. The sub-district areas that are the second priority are Noborejo, Tegalrejo and Ledok Villages. While the third priority is in the Villages of Randuacir and Cebongan. The zoning based on the basic infrastructure sector becomes the basis for proposals or recommendations for relevant program interventions.

Keywords: priority area hierarchy, poverty reduction, basic infrastructure, Argomulyo District

PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkelanjutan ditujukan untuk mencapai pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang. Tabrakan kebijakan dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk memerangi kemiskinan serta kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan berimbang. Sutarmihardja, 2004 dalam (Hadiwijoyo & Anisa, 2020) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan mendatang.

Sebagai tindak lanjut implementasi agenda pembangunan global, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 mengenai Implementasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan

tersebut mengamatkan adanya Rencana Aksi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota untuk menerapkan tujuan SDG's di tingkat lokal. Upaya tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat mengadaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan daerah.

Penanggulangan kemiskinan di sektor infrastruktur dasar merupakan komponen penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan temuan penelitian Chowdhury et al., (2009) bahwa infrastruktur publik lokal bergantung pada sumberdaya lokal dalam konteks ini pemerintah daerah dan masyarakatnya.

Infrastruktur dasar menjadi salah satu dimensi yang penting dalam memahami kemiskinan sebagaimana dalam kemiskinan multidimensional selain dari dimensi pendidikan, kesehatan, pangan, dan kualitas hidup masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Kementrian PPN/ Bappenas (2020). Salah satu indikator yang menarik dalam melihat kemiskinan di masyarakat yaitu kemampuan masyarakat dalam mengakses infrastruktur dasar. Menurut Sulistyowati (2014) Pembangunan Infrastruktur dapat dikategorikan menjadi dua yaitu infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi atau infrastruktur fisik digunakan dalam proses produksi yang mampu dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain prasarana umum seperti tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih maupun sanitasi serta pembangunan limbah. Sementara itu, infrastruktur sosial merupakan prasarana sosial antara lain kesehatan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur dasar tersebut berhubungan erat dengan karakteristik dari kemiskinan yang dialami oleh masyarakat.

World Bank (2002) menjelaskan bahwa karakteristik RuTa miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga maupun individu. Dalam hal ini faktor komunitas, infrastruktur adalah hal yang determinan utama kemiskinan. Infrastruktur memiliki kaitan erat terkait tingkat kesejahteraan masyarakat di mana infrastruktur yang baik dapat mempermudah masyarakat untuk dapat menjalankan aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial di masyarakat. Studi oleh Nugraheni & Priyarsono (2012) mengungkapkan bahwa ketersediaan infrastruktur memiliki keterkaitan dengan tingkat perkembangan wilayah, antara lain laju pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa daerah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik seringkali laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraannya baik pula. Sebaliknya, laju pertumbuhan ekonomi akan terbatas di daerah yang memiliki kelengkapan infrastruktur yang terbatas laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan studi dari Purnami Yuli S, Baharudin Machmud, M. Iswahyudi Subroto Zhazhen Regina P, Yunita Hilda S & I (2016)

yang membahas kemiskinan DIY menggunakan kluster hirarki dan pemetaan masalah kemiskinan di tiap desa di DIY, intervensi program penanggulangan kemiskinan pada wilayah prioritas akan lebih efektif apabila analisis dan intervensi programnya dilakukan dengan menggunakan cluster hirarki pewilayahan. Selanjutnya (Lembaga Penelitian Unisbank Semarang, 2008) memetakan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dengan menggunakan 13 komponen kebutuhan dasar sebagai pijakan dalam menentukan hirarki pewilayahan.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Asselin (2009) dalam bukunya *Analysis Multidimensional Poverty* juga menjelaskan bahwa secara eksplisit kemiskinan yang rekonsentrasi sehingga kemiskinan tidak hanya dalam sudut pandang konsumsi rumah tangga tapi indikator pemasukan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, nutrisi dan makanan, air/sanitasi, tenaga kerja, hunian yang layak, akses aset produktif, akses ke pasar dan partisipasi. Sementara studi oleh Alkire & Foster (2011) menjelaskan bahwa pengukuran kemiskinan dapat dipecah secara konseptual menjadi 2 (dua) langkah berbeda: (1) Terdapat langkah identifikasi batas-batas untuk membedakan masyarakat miskin atau masyarakat tidak miskin, dan (2) Kemudian terdapat langkah agregasi menyatukan data tentang masyarakat miskin menjadi sebuah indikator kemiskinan secara keseluruhan. Memilih pendekatan untuk mengidentifikasi kaum miskin lebih kompleks ketika ukuran kemiskinan menggunakan banyak variabel.

Menurut *Overseas Development Institute* atau ODI (2013) Indonesia berada pada tingkat kerentanan sedang >10% dengan pendapatan kurang dari 1,25 dollar menurut hasil indeks kerentanan kemiskinan penuh menggunakan baseline scenario. Berita resmi statistik No. 56/07/ Th. XXII yang dikutip dari BPS (2019) menunjukkan bahwa persentase RuTa miskin di Indonesia mengalami peningkatan dari 9,22% pada tahun 2019 menjadi 9,78% pada tahun 2020. Sedangkan dalam konteks Kota Salatiga, juga angka kemiskinan juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 4,76% menjadi 4,94% pada tahun 2020. Hal tersebut ditengarai merupakan akibat dari munculnya pandemi covid-19 di awal tahun 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu upaya sinergis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut upaya penanggulangan kemiskinan terutama di masa pandemi diharapkan

Hirarki Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Infrastruktur Dasar menjadi lebih terintegrasi melalui kelompok program yang tertuang dalam peraturan tersebut.

Selain itu parameter infrastruktur dasar sebagai salah satu hal relevan diintervensi dalam program penanggulangan kemiskinan juga dipulikasikan oleh Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang setiap tahun data dilakukan *update* oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial. Data terpadu inilah yang dapat dijadikan referensi dalam intervensi program berdasarkan kriteria yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam konteks ini penanggulangan kemiskinan yang salah satunya berpijak pada parameter sektor infrastruktur dasar menjadi salah satu hal yang penting untuk dipetakan, dan selanjutnya dilakukan penentuan hirarki wilayah prioritas yang merujuk pada indikator dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, penting melakukan pewilayahan kemiskinan dengan merujuk pada sektor infrastruktur dasar dengan unit kajian Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dan analisis intervensi pembangunan infrastruktur dasar di wilayah prioritas.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Salatiga, maupun data yang diperoleh dari Dinas Sosial berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai data dasar untuk intervensi penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga, dimana salah satu parameter yang digunakan adalah data infrastruktur dasar. Sedangkan variabel untuk mengetahui kesejahteraan sosial berdasarkan data agregat infrastruktur dasar yaitu indikator fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB), tempat pembuangan akhir tinja, cara memperoleh air minum, sumber air minum, dan sumber penerangan utama yang didalam indikator terdiri dari beberapa variabel. Selanjutnya, dilakukan penyamaan penyamaan asumsi satuan sebagai dasar dalam pembuatan indeks gabungan. Selain itu, masing masing indikator tidak selalu memiliki satuan yang sama sehingga menjadikan kelurahan prioritas memiliki satuan harus sama. Sehingga perlunya penggabungan dari berbagai macam indikator (*multi indikator*) kemudian dapat disusun indek komposit hasil penjumlahan nilai skala dan dapat di klasifikasikan menjadi hirarki pewilayahan miskin maupun hirarki kelurahan prioritas.

Unit kajian dalam penelitian ini yaitu seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Wilayah Kecamatan Argomulyo terdiri dari 6 kelurahan yaitu Kelurahan Noborejo, Randuacir, Tegalrejo, Cebongan, Ledok dan Kumpulrejo. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020, terdapat 3485 Rumah Tangga (RuTa) di Kecamatan Argomulyo. Jumlah

RuTa tersebut merupakan data terbesar dibandingkan 3 kecamatan lain di Kota Salatiga yaitu Kecamatan Sidomukti (3000 RuTa), Kecamatan Sidorejo (3333 RuTa), dan Kecamatan Tingkir (3141 RuTa). Dengan demikian sebanyak 26,89% Rumah Tangga dari 12.959 Rumah Tangga se-Kota Salatiga berada di Kecamatan Argomulyo.

Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan dengan prinsip penskalaan (teknik penskalaan/*scalling*) terhadap variabel variabel penentu kesejahteraan sosial. Prinsip penggunaan teknik penskalaan yaitu dengan menyamakan satuan dari berbagai indikator yang digunakan dengan memposisikan nilai indikator terhadap nilai maksimum (tertinggi) dan minimum (terendah) dan mengalikan dengan 100 Muta'ali (2015). Prinsip penskalaan ini dengan membuat satuan (*range*) yang sama sehingga antar indikator dapat dijumlahkan nilai skalanya agar mendapatkan total indeks komposit. Kemudian setelah melakukan penyusunan indeks komposit tersebut dilakukan pembobotan masing masing indikator sehingga dapat diperoleh hirarki pewilayahan kemiskinan berdasarkan sektor infrastruktur dasar. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan peta. Peta yang dihasilkan yaitu Peta Kelurahan Prioritas Sektor Infrastruktur Dasar di Kecamatan Argomulyo, Salatiga Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Sektor Infrastruktur dasar

Pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran mampu membantu percepatan lalu lintas perekonomian masyarakat dan dapat berdampak secara tidak langsung dalam mengentaskan kemiskinan di suatu wilayah. Untuk menentukan hirarkhi wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan berdasarkan infrastruktur dasar di Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, dapat dilihat melalui beberapa indikator, di antaranya: indikator fasilitas tempat BAB, indikator tempat pembuangan akhir tinja, indikator sumber air minum, dan indikator sumber penerangan utama. Berdasarkan hasil indikator data agregat DTKS Tahun 2020 yang telah diolah menggunakan teknik *scalling*, dan selanjutnya dibuat satuan (*range*) sebagai dasar dalam pembuatan total indeks komposit, yang selanjutnya dilakukan pembobotan masing-masing indikator tersebut untuk penentuan hirarkhi pewilayahan kemiskinan di Kecamatan Argomulyo berdasarkan sektor infrastruktur dasar.

Indikator Fasilitas Tempat Buang Air Besar (BAB)

Sanitasi jamban meliputi jenis pemakaian maupun penggunaan tempat buang air besar, jenis kloset yang digunakan, dan jenis tempat pembuangan akhir tinja.

Pada Data Agregat DTKS terdapat indikator fasilitas tempat BAB dan indikator tempat pembuangan akhir tinja yang terdiri dari variabel kepemilikan fasilitas tempat BAB sendiri, bersama, umum dan tidak ada. Tabel 1 (dalam lampiran) menunjukkan bahwa variabel fasilitas tempat BAB sendiri di Kecamatan Argomulyo sebanyak 2878 Rumah Tangga (RuTa). Diantara 2878 RuTa yang memiliki fasilitas tempat BAB terdapat 654 RuTa atau 22,72% di Kelurahan Kumpulrejo, 554 RuTa atau 19,25% di Kelurahan Noborejo, 457 RuTa atau 15,88% di Kelurahan Ledok, 448 RuTa atau 15,57 di Kelurahan Randuacir, 441 RuTa atau 15,32% di Kelurahan Tegalrejo, dan 324 RuTa atau 11% di Kelurahan Cebongan. Sedangkan pada variabel fasilitas tempat BAB bersama menunjukkan bahwa dari 555 RuTa terdapat 131 RuTa di Kelurahan Tegalrejo yang memiliki fasilitas tempat BAB bersama; sedangkan sedikit di antaranya hanya 37 RuTa di Kelurahan Cebongan yang memiliki fasilitas tempat BAB bersama. Hal ini menunjukkan bahwa RuTa yang memiliki fasilitas tempat BAB sendiri dan bersama masuk ke dalam kriteria akses terhadap sanitasi yang layak.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Tabel 1 variabel fasilitas tempat BAB umum di Kecamatan Argomulyo terdapat 18 RuTa yang menggunakan fasilitas tempat BAB umum. Di antaranya yaitu 7 RuTa di Kelurahan Ledok, 5 RuTa di Kelurahan Kumpulrejo, 3 RuTa di Kelurahan Randuacir, 2 RuTa di Kelurahan Tegalrejo dan tidak ada RuTa di Kelurahan Cebongan yang menggunakan fasilitas tempat BAB bersama. Hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Cebongan memiliki sanitasi yang layak dibandingkan dengan beberapa kelurahan seperti di Kelurahan Ledok dan Kumpulrejo yang masyarakatnya bergantung pada fasilitas tempat BAB umum.

Selain itu terdapat variabel tidak ada fasilitas tempat BAB yaitu diindikasikan masyarakatnya melakukan aktifitas BAB di kolam/sawah/sungai/ tempat lainnya. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 34 RuTa di Kecamatan Argomulyo yang tidak memiliki akses tempat buang air besar. Rumah Tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB yaitu di Kelurahan Kumpulrejo sebanyak 25 RuTa, 7 RuTa di Kelurahan Noborejo, dan 2 RuTa di Kelurahan Tegalrejo. Hal ini menunjukkan di bahwa di ketiga kelurahan tersebut masih terdapat RuTa yang belum memiliki akses sanitasi layak. Hak tersebut berbeda dengan Kelurahan Cebongan, Ledok dan Randuacir yang sebagian masyarakatnya telah memiliki fasilitas tempat BAB.

Berdasarkan hasil olah data dari indikator fasilitas tempat BAB dihasilkan indeks komposit tinggi berada di Kelurahan Kumpulrejo yang merupakan Hirarki I, dengan indek scalling 100 sebagai pengaruh dari tidak ada RuTa yang memiliki fasilitas BAB. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Kelurahan Kumpulrejo merupakan Kelurahan prioritas yang memerlukan Intervensi fasilitas tempat BAB. (Gambar 1). Sedangkan Kelurahan Ledok, Noborejo dan Tegalrejo masuk

dalam Hirarki II, dan untuk Kelurahan Cebongan dan Randuacir termasuk dalam Hirarki III.

Indikator Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Sanitasi jamban juga berkaitan dengan ketersediaan tempat pembuangan akhir tinja. Pembuatan jamban difungsikan untuk membuat lingkungan tempat hidup sehat dan untuk mencegah terjadinya pencemaran karena tinja mengandung bakteri E.Coli. Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat variabel tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki, SPAL, lubang tanah, kolam/sawah, dan lainnya. Variabel tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki di Kecamatan Argomulyo sebanyak 2743 RuTa. Berdasarkan data tersebut terdapat 534 RuTa di Kelurahan Tegalrejo, 498 RuTa (18,16%) di Kelurahan Noborejo, 493 RuTa (17,97%) di Kelurahan Kumpulrejo, 486 RuTa (17,12%) di Kelurahan Ledok, 446 RuTa (16,26%) di Kelurahan Randuacir dan 286 RuTa (10,43%) di Kelurahan Cebongan. Sementara 95 RuTa di Kecamatan Argomulyo menggunakan SPAL untuk pembuangan akhir tinja yaitu sebesar 57 RuTa di Kelurahan Kumpulrejo, 19 RuTa di Kelurahan Ledok, 6 RuTa di Kelurahan Cebongan, 6 RuTa di Kelurahan Noborejo, 5 RuTa di Kelurahan Tegalrejo dan 2 RuTa di Kelurahan Randuacir. Hal ini menunjukkan bahwa RuTa yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau darana pembuangan air limbah SPAL, merupakan kriteria RuTa dengan akses terhadap sanitasi layak. Sedangkan pada tabel 2 menunjukkan terdapat 615 RuTa di Kecamatan Argomulyo membuang akhir tinja di lubang tanah. Dari data tersebut nampak bahwa, RuTa yang membuang tinja di lubang tanah paling banyak berada di Kelurahan Kumpulrejo, yang menembus angka 214 RuTa atau sekitar 34,80%. Selebihnya: 138 RuTa (22,4%) berada di Kelurahan Noborejo, 95 RuTa (15,44%) di Kelurahan Randuacir, 69 RuTa (11,21%) di Kelurahan Cebongan, 68 RuTa (11,05%) di Kelurahan Ledok, dan hanya 31 RuTa (0,05%) di Kelurahan Tegalrejo.

17 RuTa di Kelurahan Argomulyo membuang akhir tinjanya di kolam/sawah/sungai yaitu 6 RuTa di Kelurahan Kumpulrejo, 5 RuTa di Kelurahan Tegalrejo, 3 RuTa di Kelurahan Ledok dan 3 RuTa di Kelurahan Noborejo sedangkan di Kelurahan Cebongan dan Kelurahan Randuacir telah membuang tinja di tempat yang layak.

Variabel lain yang menunjukkan sanitasi tidak layak yaitu membuang tinja di tempat lainnya; dengan jumlah RuTa terbanyak berada di Kelurahan Kumpulrejo yaitu sebesar 11 RuTa dari 17 RuTa yang membuang tinja di tempat lainnya. Sedangkan selebihnya, 2 RuTa di Kelurahan Ledok, 1 RuTa di Kelurahan Noborejo dan 1 RuTa di Kelurahan Noborejo. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat membuang tinja di lubang tanah maupun

kolam/sawah/sungai/lainnya merupakan kriteria sanitasi tidak layak dan berpengaruh pada pencemaran tanah dan air di sekitarnya serta berdampak buruk terkait penularan penyakit, menyangkut transmisi penyakit dari tinja. RuTa yang masuk kriteria tersebut merupakan RuTa yang rentan terkena penyakit menular seperti hepatitis A, polio, cholera dan lainnya.

Berdasarkan hasil olah data dari indikator tempat pembuangan akhir tinja tersebut dapat dihasilkan indeks komposit yang menunjukkan hasil indeks *scalling* 100 berada di Kelurahan Kumpulrejo yang merupakan Hirarki I dengan pengaruh dari variabel tempat pembuangan akhir tinja di kolam/sawah/danau maupun lainnya dengan indeks *scalling* 100 sehingga menghasilkan indeks *scalling* tinggi, maka dapat diartikan bahwa Kelurahan Kumpulrejo merupakan Kelurahan prioritas yang memerlukan Intervensi tempat pembuangan BAB. Sedangkan Hirarki ke III yaitu di Kelurahan Ledok, Noborejo, Tegalrejo, Cebongan dan Randuacir.

Indikator Sumber Air Minum

Rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan presentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Indikator sumber air minum yang dikelola secara aman didasarkan pada asumsi bahwa sumber air tersebut dapat menyediakan kebutuhan dasar yang dapat memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari masyarakat dan memenuhi syarat kualitas air minum. Pada Indikator Sumber Air minum perlu memperhatikan variabel air kemasan bermerk, air isi ulang, ledeng meteran, ledeng eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, dan lainnya.

Hal ini berhubungan dengan Data agregat DTKS sektor infrastruktur dasar dari indikator sumber air minum. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan variabel sumber air minum berupa air isi ulang di Kecamatan Argomulyo yaitu diantaranya 5 RuTa di Kelurahan Kumpulrejo dan 4 RuTa di Kelurahan Tegalrejo. Variabel lain yaitu 1232 RuTa di Kecamatan Argomulyo menggunakan ledeng meteran sebagai air minum yaitu sebanyak 406 RuTa di Kelurahan Ledok, 313 RuTa di Kelurahan Tegalrejo, 300 RuTa di Kelurahan Kumpulrejo, 107 RuTa di Kelurahan Cebongan, 104 RuTa di Kelurahan Randuacir dan 2 RuTa di Kelurahan Noborejo. Sementara variabel lain yaitu menggunakan ledeng eceran sebagai sumber air minum yaitu terbanyak berada di Kelurahan Tegalrejo yaitu 69,81% dari 106 RuTa yang menggunakan ledeng meteran, 14,15% di Kelurahan Ledok, 9,43% di

Kelurahan Kumpulrejo dan tidak ada RuTa di Kelurahan Cebongan maupun Noborejo yang menggunakan Ledeng Eceran.

Hal ini menunjukkan RuTa yang memiliki sumber air minum berupa air isi ulang, ledeng meteran dan ledeng eceran merupakan RuTa yang memiliki akses sumber air minum layak yang dikelola secara aman dan memenuhi syarat kualitas air minum. Begitu juga dengan 211 RuTa dengan sumber air minum berupa sumur bor/pompa dan 360 RuTa dengan sumber air minum berupa sumur terindung di Kecamatan Argomulyo yang memiliki akses sumber air minum yang layak. Hal ini diasumsikan bahwa masyarakat yang mampu mengakses sumber air minum yang baik maka memiliki kemampuan finansial untuk membeli atau mendapatkan sumber air minum yang layak. Sebaliknya bagi RuTa menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi dan penampungan air hujan.

Tabel 3 menunjukkan variabel sumber air minum berupa sumur tak terlindungi yaitu sebanyak 135 RuTa di Kecamatan Argomulyo terdapat 39 RuTa (28,89%) di Kelurahan Kumpulrejo, 34 RuTa (25,19%) di Kelurahan Noborejo, 28 RuTa (20,74%) di Kelurahan Randuacir, 25 RuTa (18,52%) di Kelurahan Cebongan dan 5 RuTa (0,04%) di Kelurahan Tegalrejo. Sementara RuTa yang menggunakan mata air tak terlindungi terbanyak berada di Kelurahan Ledok dengan 36 RuTa, 32 RuTa di Kelurahan Cebongan, 14 RuTa di Kelurahan Tegalrejo, 1 RuTa di Kelurahan Kumpulrejo dan tidak ada RuTa yang menggunakan mata air tak terlindungi di Kelurahan Noborejo dan Randuacir.

Variabel lain menunjukan terdapat 181 RuTa di Kecamatan Argomulyo yang menggunakan sumber air minum lainnya yaitu 96 RuTa (53,04%) di Kelurahan Ledok, 61 RuTa (33,70%) di Kelurahan Kumpulrejo, 19 RuTa (10,50%) tau 19 RuTa di Kelurahan Cebongan dan 5 RuTa di Kelurahan Randuacir sementara tidak ada RuTa di Kelurahan Noborejo dan Tegalrejo yang menggunakan sumber air minum lainnya. Hal ini menunjukkan apabila RuTa yang menggunakan sumber air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) merupakan RuTa yang tidak memiliki akses tidak tersedia. Sedangkan berdasarkan variabel RuTa yang menggunakan sumber air yang berasal dari sumur tidak terlindungi dan/atau mata air tidak terlindungi maka menunjukkan RuTa dengan akses tidak layak.

Berdasarkan hasil olah data dari indikator sumber air minum tersebut dapat dihasilkan indeks komposit yang menunjukkan hasil indek scalling tinggi berada di Kelurahan Kumpulrejo dengan Hirarki I dengan pengaruh dari variabel sumur tak terlindungi, dan variabel lainnya dengan presentase terbanyak dan menyumbang indek scalling 100 di variabel sumur tak terlindungi. Hirarki I juga berada di Kelurahan Ledok dengan pengaruh dari variabel mata air tak terlindungi

dan variabel lainnya dengan presentase terbanyak dan menyumbang bobot scalling 100 pada variabel sumur tak terlindungi dan pada variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Ledok merupakan kelurahan prioritas yang memerlukan Intervensi sumber air minum karena variabel yang mendominasi merupakan kriteria dari sumber air minum tidak layak.

Sedangkan Hirarki I berada di Kelurahan Tegalrejo, hal ini perlu dilihat bahwa variabel dengan bobot scalling tinggi berada pada variabel air isi ulang, ledeng meteran, ledeng eceran, sumur bor/pompa dan sumur terlindungi menjadi variabel yang menyumbang indeks scalling banyak, pada variabel sumber air minum ledeng eceran Kelurahan Tegalrejo memiliki indeks scalling 100 sehingga umumnya memiliki kelayakan sumber air minumnya. Sedangkan hirarki II berada di Kelurahan Cebongan, Noborejo dan Randuacir.

Indikator Cara Memperoleh Air Minum

Salah satu indikator yang penting yaitu bagaimana RuTa memiliki cara memperoleh air minum. Indikator ini diasumsikan bahwa ketika masyarakat mampu membeli eceran maupun langganan air minum maka RuTa tersebut memiliki kemampuan finansial untuk membeli air minum tersebut. Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 49 RuTa di Kecamatan Argomulyo yang membeli eceran air minum diantaranya yaitu 17 RuTa di Kelurahan Kumpulrejo, 13 RuTa di Kelurahan Ledok, 8 RuTa di Kelurahan Randuacir, 4 RuTa di Kelurahan Cebongan, 4 RuTa di Kelurahan Noborejo dan 3 Kelurahan di Tegalrejo. RuTa yang membeli eceran relatif sedikit dibandingkan RuTa yang berlangganan air minum. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat 1352 RuTa di Kecamatan Argomulyo 33,65% diantaranya di Kelurahan Ledok, 28,62% di Kelurahan Tegalrejo, 22,26% di Kelurahan Kumpulrejo, 7,47% di Kelurahan Cebongan, 6,8% di Kelurahan Randuacir dan 1,18% di Kelurahan Ledok. Hal ini menunjukkan bahwa RuTa yang memiliki kemampuan untuk membeli eceran dan berlangganan sumber air minum yang layak maka masyarakatnya mampu memperoleh air minum yang baik.

Sedangkan berdasarkan variabel cara memperoleh air minum tidak membeli perlu diperhatikan bahwa masyarakatnya kemungkinan tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memperoleh sumber air minum. Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan terdapat 2084 RuTa di Kecamatan Argomulyo yang tidak membeli air minum yaitu 30,04% diantaranya di Kelurahan Noborejo, 22,22% di Kelurahan Kumpulrejo, 21,26% di Kelurahan Randuacir, 12,28% di Kelurahan Cebongan dan 8,93% di Kelurahan Tegalrejo. Hal ini menunjukkan bahwa RuTa yang tidak

membeli air minum diindikasikan bahwa RuTa yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli maupun berlangganan.

Berdasarkan hasil olah data dari indikator cara memperoleh air minum tersebut dapat dihasilkan indeks komposit yang menunjukkan hasil indeks scalling tinggi berada di Kelurahan Kumpulrejo dengan Hirarki I dengan pengaruh dari variabel tidak membeli air minum dengan presentase terbanyak dan menyumbang indeks scalling 100. Hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Kumpulrejo merupakan kelurahan prioritas yang memerlukan Intervensi cara memperoleh sumber air minum karena variabel yang mendominasi merupakan kriteria dari sumber air minum tidak layak. Berbeda dengan hirarki I pada Kelurahan Ledok yang menunjukkan bahwa variabel langganan air minum memiliki indeks scalling 100 yang pada umumnya memiliki kelayakan cara memperoleh air minumnya. Sedangkan hirarki II berada di Kelurahan Noborejo dan Tegalrejo sedangkan hirarki III merupakan Kelurahan Cebongan dan Randuacir.

Indikator Sumber Penerangan Utama

Faktor kualitas infrastruktur yang juga penting adalah akses listrik atau sumber penerangan utama. Hal ini diasumsikan bahwa RuTa yang memiliki sumber listrik maka RuTa yang memiliki kemampuan finansial sebaliknya jika RuTa yang tidak memiliki sumber penerangan utama maka akan mempengaruhi produktivitas individunya. Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 3349 RuTa di Kecamatan Argomulyo memiliki sumber penerangan listrik PLN yaitu sekitar 753 RuTa di Kelurahan Kumpulrejo, 629 RuTa di Kelurahan Randuacir, 568 RuTa di Kelurahan Ledok, 542 RuTa di Kelurahan Randuacir, 496 RuTa di Kelurahan Tegalrejo dan sebanyak 361 RuTa di Kelurahan Cebongan. Hal ini menunjukkan RuTa yang memiliki sumber penerangan listrik PLN merupakan RuTa yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mendukung produktivitas individunya.

Sedangkan dari 104 RuTa yang menggunakan variabel listrik non PLN diantaranya berada di Kelurahan Tegalrejo dengan 76 RuTa, 11 RuTa di Kelurahan Kumpulrejo, 9 RuTa di Kelurahan Noborejo, 7 RuTa di Kelurahan Ledok, 1 RuTa di Kelurahan Randuacir dan tidak ada RuTa di Kelurahan Cebongan yang menggunakan listrik Non PLN. Sedangkan variabel RuTa yang tidak ada listrik sebanyak 32 RuTa di Kecamatan Argomulyo diantaranya 53,13% di Kelurahan Kumpulrejo, 25% di Kelurahan Noborejo, 12,50% di Kelurahan Tegalrejo, dan 9,38% di Kelurahan Ledok. Hal ini mengindikasikan bahwa RuTa yang tidak memiliki sumber penerangan utama listrik merupakan RuTa yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli sehingga hal ini berdampak pada produktivitas individunya dalam menjalankan aktivitas.

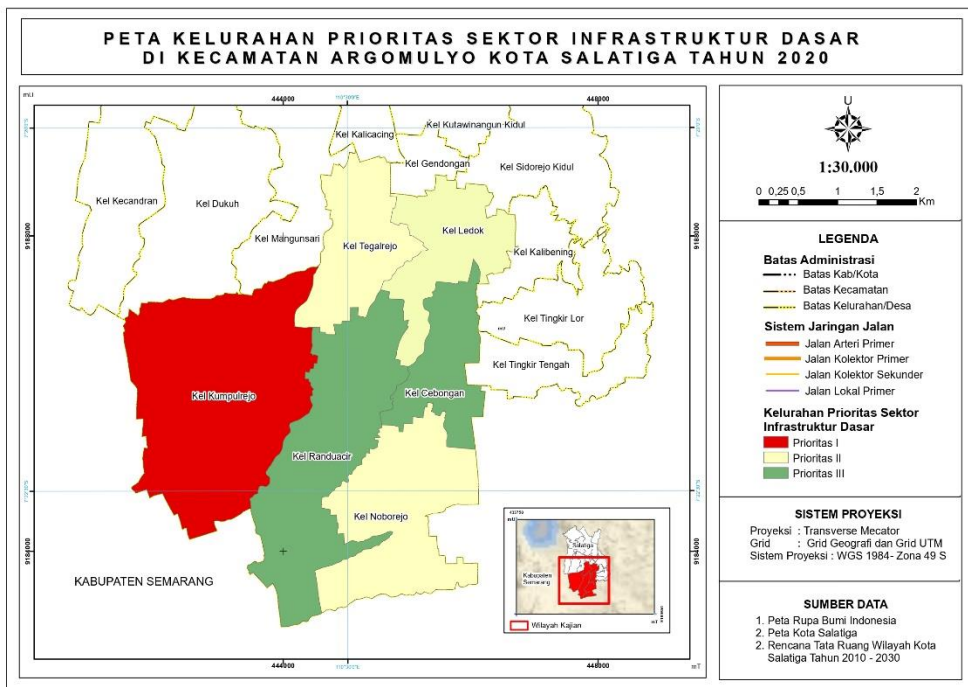
Berdasarkan hasil olah data dari indikator sumber penerangan utama tersebut dapat dihasilkan indeks komposit yang menunjukkan hasil indeks scalling tinggi berada di Kelurahan Kumpulrejo dengan Hirarki I dengan pengaruh dari variabel tidak membeli listrik dengan presentase terbanyak dan menyumbang indeks scalling 100. Hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Kumpulrejo merupakan kelurahan prioritas yang memerlukan Intervensi terkait sumber penerangan utama karena tidak layak dan menghambat produktivitas individunya. Sedangkan hirarki I di Kelurahan Tegalorejo yang menunjukkan bahwa variabel listrik non PLN memiliki indeks scalling 100 yang pada umumnya memiliki tidak memiliki kelayakan dari segi sumber penerangannya. Sedangkan hirarki II berada di Kelurahan Noborejo dan hirarki III merupakan Kelurahan Cebongan, Ledok dan Randuacir.

Hirarki Pewilayahan Kemiskinan berdasarkan Sektor Infrastruktur Dasar

Dalam konteks kondisi mikro pada sektor infrastruktur dasar di Kecamatan Argomulyo dibagi menjadi 3 hirarki yang merupakan indeks komposit dari 5 indikator yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga mampu menghasilkan kelurahan prioritas menggunakan teknik scalling. Asumsinya semakin tinggi nilai scalling, semakin tinggi indeks prioritas Intervensi di kelurahan yang menjadi hirarki wilayah I. Berdasarkan peta Kelurahan Prioritas Sektor Infrastruktur Dasar di Kecamatan Argomulyo, Salatiga Tahun 2020 (Gambar 1) mendiskripsikan bahwa Kelurahan Kumpulrejo sebagai hirarki 1 atau kelurahan prioritas pertama yang memiliki indeks scalling tinggi dari kelurahan lainnya. Hal ini menunjukkan di Kelurahan Kumpulrejo sebagian besar rumah tangganya memiliki sanitasi kurang layak. Threshold indikator sanitasi yaitu rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat bab sendiri dan pembuangan akhir tinja. Begitu dengan kelayakan sumber penerangan utama di Kelurahan Kumpulrejo yang masih kurang layak karena terdapat rumah tangga yang tidak memiliki listrik. Hirarki I ini menjadi kelurahan prioritas pertama yang nantinya perlu Intervensi dari pemerintah daerah.

Kemudian hirarki II di Kelurahan Ledok, Kelurahan Noborejo, Kelurahan Tegalorejo merupakan kelurahan prioritas kedua dimana terdapat beberapa sektor infrastruktur dasar dengan indikator tertentu yang harus diintervensi oleh pemerintah. Dalam hal ini di Kelurahan Ledok telah memiliki sumber air minum yang layak dan cara memperoleh air minumnya banyak yang berlangganan PDAM. Sementara di Kelurahan Noborejo memiliki indikator air bersih yang layak dimana rumahtangganya menggunakan sumber air minum yang layak. Sedangkan di Kelurahan Tegalorejo merupakan wilayah dengan sanitasi yang layak dimana sebagian rumah tangganya memiliki fasilitas tempat BAB sendiri dan sumber penerangan utama banyak yang menggunakan listrik non PLN.

Kemudian Hirarki III di Kelurahan Randuacir, dan Cebongan didasarkan pada asumsi bahwa kedua kelurahan tersebut memiliki bobot scalling terkecil karena berdasarkan sumber air minum yang dikelola sebagian RuTa rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa air isi ulang, ledeng meteran, ledeng eceran, sumur bor/pompa, sumur terindung dengan memadai dan sebagian kecil saja yang menggunakan sumber air minum utama di sumur tak terindung, mata air tak terindung. Begitu juga berdasarkan sumber penerangan utama sebagian di Kelurahan Randuacir dan Kelurahan Cebongan telah layak memiliki sumber penerangan utama dari PLN. Hirarki III ini menjadi kelurahan prioritas ketiga perlu pertimbangan pertimbangan kembali dalam pembangunan infrastruktur dasar di kedua kelurahan tersebut. Perlu digaris bawahi hasil olah data agregat DTKS Tahun 2020 dari segi infrastruktur dasar saja sebagai pendukung produktivitas RuTanya maupun kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar RuTa di Kecamatan Argomulyo.



Gambar 1 Peta Hirarki Pewilayahan Kelurahan Prioritas Sektor Infrastruktur Dasar Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2020

Analisis dan Intervensi Pembangunan Infrastruktur dasar di Kelurahan Prioritas

Kelayakan infrastruktur dasar sangat penting karena ketika rumah tangga memiliki akses sanitasi, air bersih dan listrik yang layak maka rumah tangga tersebut memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak

pendapatan. Hal ini penting bagi kesejahteraan masyarakat dan prakondisi untuk upaya penanggulangan kemiskinan sehingga salah satu penanggulangan kemiskinan yaitu dengan membangun infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakatnya sesuai dengan *Sustainable Development Goals/* Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu tujuan ke 1 (Tanpa Kemiskinan), 3 (Kehidupan sehat dan Sejahtera), 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), dan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan 17 (Kemitraan untuk mencapai tujuan sehingga penting untuk mempertimbangkan tujuan-tujuan lain dalam pembangunan daerah melalui program dan kegiatan.

Program pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar seringkali terlalu kecil, tidak terencana dan belum terlaksana dengan baik dan banyak infrastruktur yang belum layak bagi masyarakatnya seperti dalam Kementerian PUPR (2018). Hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya Intervensi program dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran di wilayah prioritas. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa program yang relevan terutama dikaitkan dengan bidang infrastruktur dasar di Kelurahan Prioritas di Kecamatan Argomulyo.

- a. Pilihan program dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyediakan akses terhadap air minum yang layak, merujuk pada Indikator sumber air minum dan cara memperoleh air minum:
 - 1) Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat). Program ini melibatkan peran aktif masyarakat setempat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan sehingga dapat menjamin keberlanjutan program. Program ini dilakukan dengan asas gotong royong pada semua tahap pembangunan serta secara swadana melakukan mekanisme CSF, air bersih menjadi mudah diakses dan dijangkau bagi masyarakat.
 - 2) Penyediaan dan pengelolaan air minum dengan kerjasama dengan pemerintah dan swasta. Program ini mengembangkan mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyediaan dan pengelolaan air minum seperti kerjasama pemerintah dan Swasta. Adanya kontrak kerja dengan mekanisme konsesi BOT (*Build Operate Transfer*) dapat meningkatkan persediaan air minum yang berkualitas, baik dan harga terjangkau.
 - 3) Program ZAMP (Zona Air Minum Prima). Program ZAMP diinisiasi dengan bantuan USAID. Kualitas air bersih dapat menciptakan kawasan pelayanan PDAM dengan kualitas air setara air minum sehingga air dapat langsung diminum tanpa perlu dimasak dahulu.

- 4) Program Konservasi air tanah. Program ini menggunakan teknologi sederhana untuk meningkatkan cadangan air tanah yaitu dengan cara pengisian air tanah secara alami (*natural recharge*), pengisian air tanah buatan (*artificial recharge*), lubang resapan biopori, dan sumur resapan air.
- b. Pilihan program dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengelola air limbah yang layak, merujuk pada Indikator Fasilitas tempat BAB dan Pembuangan akhir Tinja. Pembangunan Infrastruktur pengelolaan air limbah komunal berbasis masyarakat yaitu Program air limbah dibutuhkan pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal berbasis masyarakat. Pengembangan sistem air limbah komunal di tingkat lingkungan terkecil seperti kelurahan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur sanitasi dengan melibatkan masyarakat.
- c. Pilihan program dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan infrastruktur persampahan yang ramah lingkungan. Program yang menerapkan konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) yaitu konsep EPR yaitu mendorong produsen untuk menanganani sendiri sampah yang sulit didaur ulang atau dibebankan dalam biaya produksi perusahaan. Program ini merupakan bentuk dari skema perpanjangan kewajiban produsen sampah di Kota Salatiga sehingga dapat mengurangi beban kota dalam mengelola sampah rumah tangga.
- d. Pilihan program dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk infrastruktur listrik yang layak, yang merujuk pada pemenuhan Indikator sumber penerangan utama. Program subsidi pemasangan meteran listrik dihunian miskin dikarenakan tingginya harga membeli listrik di permukiman membuat masyarakat tidak memiliki sumber penerangan utama sehingga diperlukan kebutuhan dasar rumah tangga akan penerangan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pewilayahan kemiskinan berdasarkan infrastruktur dasar menunjukkan bahwa Kelurahan Kumpulrejo merupakan wilayah yang dapat menjadi prioritas intervensi program penanggulangan kemiskinan maupun program permasalahan sosial lainnya di Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Tahun 2020. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan indikator fasilitas tempat BAB, tempat pembuangan akhir tinja, sumber air minum, cara memperoleh air minum dan sumber penerangan

Hirarki Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Infrastruktur Dasar utama. Untuk wilayah kelurahan yang menjadi Prioritas kedua yaitu Kelurahan Noborejo, Tegalorejo dan Ledok. Sedangkan prioritas ke tiga yaitu di Kelurahan Randuacir dan Cebongan. Pewilayahan berdasarkan sektor infrastruktur dasar tersebut menjadi pijakan usulan atau rekomendasi intervensi program yang relevan antara lain penyediaan akses terhadap air minum yang layak, mengembangkan infrastruktur persampahan yang ramah lingkungan, mengelola air limbah yang layak, mengembangkan infrastruktur listrik yang layak sebagai upaya pembangunan infrastruktur dasar untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga.

REFERENSI

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. In *Journal of Public Economics* (Vol. 95, Issues 7–8). <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Asselin, L. M. (2009). *Analysis of Multidimensional Poverty* (J.-B. Ki & V. T. Anh (eds.)). Spinger. <http://www.springer.com/7140>
- BPS. (2019). *Kota Salatiga dalam Angka*. Salatiga: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). *Profil Kemiskinan di Indonesia (Maret 2019)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chowdhury, S., Yamauchi, F., & Dewina, R. (2009). Governance Decentralization and Local Infrastructure Provision in Indonesia. *IFPRI Discussion Paper, October*, 32.
- Dinas Sosial. (2021). *Data Agregat DTKS. Kota salatiga Tahun 2020*. Salatiga: Dinas Sosial.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti., & Anisa, Fahima Diah. (2020). *Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis SDG's*. Depok: Raja Grafindo.
- Kementrian PPN/ Bappenas. (2020). *Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Kementrian PPN/Bappenas. (2020). *Pilar Pembangunan Lingkungan*. Jakarta: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Kementrian PUPR. (2018). *Panduan Prktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan New Urban Agenda*. Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Lembaga Penelitian Unisbank Semarang. (2008). Studi Pemetaan Kemiskinan di Kota Semarang. *Riptek, 1*(2), 35–39. http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp-content/uploads/2013/12/4.-STUDI_PEMETAAN_KEMISKINAN_-_LPPM_UNISBANK.pdf
- Muta'ali, Luthfi. (2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.

- Nugraheni, D., & Priyarsono, D. S. (2012). Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, dan Kemiskinan: Analisis Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2009. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(2), 148–167. <https://doi.org/10.21002/jepi.v12i2.495>
- ODI. (2013). *The geography of poverty , disasters and climate extremes in 2030, Research Report and Study, Overseas Development Institute, UK*. 88. <http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8633.pdf>
- Purnami Yuli S, Baharudin Machmud, M. Iswahyudi Subroto Zhazhen Regina P, Yunita Hilda S, E. W., & I. (2016). Analisis Cluster Hirarki dan Pemetaan Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015. *Seminar Nasional Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan, ISBN 978-979-3812-46-5*.
- Sulistyowati, N. (2014). The Effect of Educational, Health, Infrastructure Expenses on the Workforce Employment and Poverty. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 20(3). <https://doi.org/10.20476/jbb.v20i3.3208>
- World Bank. (2002). *World Development Report 2002 (Overview): Building Institution For Markets*. Retrieved from <https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-5016-1>

LAMPIRAN

Tabel 1

Tabel 1 Kelurahan Prioritas Berdasarkan Indikator Fasilitas Tempat BAB

Kelurahan	Sendiri			Bersama			Umum			Tidak Ada		Total Bobot	Hirarki	
	Pdd	Scalling	bobot	RTa	Scalling	bobot	RTa	Scalling	bobot	RTa	Scalling			bobot
Cebongan	324	0,00	0,00	37	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	II
Kumpulrejo	654	100,00	2272,41	97	63,83	1115,58	5	71,43	1984,13	25	100,00	7352,94	12725,06	I
Ledok	457	40,30	639,98	114	81,91	1682,58	7	100,00	3888,89	0	0,00	0,00	6211,44	I
Noborejo	554	69,70	1341,63	84	50,00	756,76	1	14,29	79,37	7	28,00	576,47	2754,22	I
Randuacir	448	37,58	584,92	92	58,51	969,91	3	42,86	714,29	0	0,00	0,00	2269,11	I
Tegalrejo	441	35,45	543,28	131	100,00	2360,36	2	28,57	317,46	2	8,00	47,06	3268,15	I
Jumlah	2878			555			18			34				

Sumber: Dinas Sosial, 2021 (data diolah)

Tabel 2 Kelurahan Prioritas Berdasarkan Indikator Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Kelurahan	Tangki			SPAL			Lubang Tanah			Kolam/Sawah/Sungai/ Danau/Laut			Lainnya		Total Bobot	Hirarki	
	Pdd	Scalling	bobot	RTa	Scalling	bobot	RTa	Scalling	bobot	RTa	Scalling	bobot	RTa	Scalling			bobot
Cebongan	286	0,00	0,00	6	7,27	45,93	69	20,77	232,97	0	0,00	0,00	0	0	0	278,91	III
Kumpulrejo	493	83,47	1500,17	57	100,00	6000,00	214	100,00	3479,67	6	100,00	3529,41	11	100,00	6470,59	20979,84	I
Ledok	486	80,65	1428,86	19	30,91	618,18	68	20,22	223,56	3	50,00	882,35	2	18,18	213,90	3366,85	III
Noborejo	498	85,48	1551,99	6	7,27	45,93	138	58,47	1312,01	3	50,00	882,35	1	9,09	53,48	3845,76	III
Randuacir	446	64,52	1049,00	2	0,00	0,00	95	34,97	540,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1589,23	III
Tegalrejo	534	100,00	1946,77	5	5,45	28,71	31	0,00	0,00	5	83,33	2450,98	1	9,09	53,48	4479,94	III
Jumlah	2743			95			615			17			17				

Sumber: Dinas Sosial, 2021 (Data Diolah)

Tabel 3a Kelurahan Prioritas Berdasarkan Indikator Sumber Air Minum

Kelurahan	Air Isi Ulang			Ledeng Meteran			Ledeng Eceran			Sumur Bor/Pompa			Sumur Terlindung		
	Pdd	Scalling	bobot	RTa	Scalling	bobot	RTa	Scalling	bobot	RTa	Scalling	bobot	RTa	Scalling	bobot
Cebongan	0	0	0	107	25,99	225,73	0	0,00	0,00	36	33,01	563,20	142	22,46	209,17
Kumpulrejo	5	100	5555,56	300	73,76	1796,16	7	9,46	62,47	8	5,83	22,09	360	61,96	1462,58
Ledok	0	0	0	406	100,00	3295,45	15	20,27	286,84	2	0,00	0,00	18	0,00	0,00
Noborejo	0	0	0	2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40	36,89	699,40	570	100,00	3737,7
Randuacir	0	0	0	104	25,25	213,13	10	13,51	127,49	105	100,00	4976,3	290	49,28	937,04
Tegalrejo	4	80	3555,56	313	76,98	1955,75	74	100	6981,13	20	17,48	165,65	145	23,01	218,76
Jumlah	9			1232			106			211			1525		

Sumber: Dinas Sosial, 2021 (Data Diolah)

Tabel 3b Kelurahan Prioritas Berdasarkan Indikator Sumber Air Minum

Kelurahan	Sumur Tak Terlindung			Mata Air Tak Terlindung			Lainnya			Total Bobot	Hirarki
	Pdd	Scalling	bobot	RTa	Scalling	bobot	RuTa	Scalling	bobot		
Cebongan	25	60	1111,11	32	88,89	3427,04	19	19,79	207,76	5744,01	II
Kumpulrejo	39	100	2888,89	1	2,78	3,35	61	63,54	2141,46	13932,55	I
Ledok	4	0,00	0,00	36	100,00	4337,35	96	100,00	5303,87	13223,51	I
Noborejo	34	85,71	2158,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6595,83	II
Randuacir	28	68,57	1422,22	0	0,00	0,00	5	5,21	14,39	7690,57	II
Tegalrejo	5	2,86	10,58	14	38,89	655,96	0	0,00	0,00	13543,38	I
Jumlah				83							

Sumber: Dinas Sosial, 2021 (Data Diolah)

Tabel 4 Kelurahan Prioritas Berdasarkan Indikator Cara Memperoleh Air Minum

Kelurahan	Pdd	Membeli Eceran			Langganan			Tidak Membeli			Total Bobot	Hirarki
		Scalling	bobot	RTa	Scalling	bobot	RTa	Scalling	bobot			
Cebongan	4	7,14	58,31	101	19,36	144,64	256	28,29	347,57	550,53	III	
Kumpulrejo	17	100,00	3469,39	301	64,92	1445,34	463	68,41	1519,88	6434,60	I	
Cebongan	4	7,14	58,31	101	19,36	144,64	256	28,29	347,57	550,53	III	
Kumpulrejo	17	100,00	3469,39	301	64,92	1445,34	463	68,41	1519,88	6434,60	I	
Noborejo	4	7,14	58,31	16	0,00	0,00	626	100,00	3003,84	3062,15	II	
Randuacir	8	35,71	583,09	92	17,31	117,80	443	64,53	1371,83	2072,73	III	
Tegalrejo	3	0,00	0,00	387	84,51	2419,04	186	14,73	131,46	2550,50	II	
	49			1352			2084					

Sumber: Dinas Sosial, 2021 (Data Diolah)

Tabel 5 Kelurahan Prioritas Berdasarkan Indikator Sumber Penerangan Utama

Kelurahan	Pdd	Listrik PLN			Listrik Non PLN			Tidak Ada Listrik			Total Bobot	Hirarki
		Scalling	bobot	RTa	Scalling	bobot	RTa	Scalling	bobot			
Cebongan	361	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	III	
Kumpulrejo	753	100,00	2248,43	11	14,47	153,09	17	100,00	5312,50	7714,02	I	
Ledok	568	52,81	895,61	7	9,21	61,99	3	17,65	165,44	1123,04	III	
Noborejo	629	68,37	1284,06	9	11,84	102,48	8	47,06	1176,47	2563,01	II	
Randuacir	542	46,17	747,27	1	1,32	1,27	0	0,00	0,00	748,53	III	
Tegalrejo	496	34,44	510,05	76	100,00	7307,69	4	23,53	294,12	8111,86	I	
	3349			104			32					

Sumber: Dinas Sosial, 2021 (Data Diolah)